

Investasi Kunci Akselerasi Pertumbuhan Oleh Novy Lumanauw, Leonard Cahyoputra, dan Triyan Pangastuti

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa investasi merupakan kunci utama dalam pemulihan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, terlebih dalam kondisi pandemi. Berbagai terobosan telah diambil Kabinet Indonesia Maju untuk mendorong investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, sehingga akan makin banyak tercipta lapangan pekerjaan dan meningkatkan arus masuk dana global.

Investasi juga menjadi jembatan untuk mentransformasi ekonomi, dari yang selama ini mengandalkan konsumsi ke arah ekonomi produktif. Selain itu, investasi ke depan harus

diarahkan pada sektor manufaktur dan hilirisasi yang bernilai tambah tinggi.

“Salah satu yang paling penting adalah diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan turunannya. *Omnibus law* pertama ini menjamin kemudahan membuka usaha dan berbagai insentif lainnya. Undang-Undang Cipta Kerja dimaksudkan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di Indonesia, serta memberikan perlindungan bagi koperasi dan UMKM serta industri nasional,” kata Presiden Jokowi saat membuka *Investor Daily Summit 2021* yang diselenggarakan dalam rangka hari ulang tahun ke-20 Harian *Investor Daily*, Selasa (13/7/2021).

Investor Daily Summit (IDS) 2021 bertema “Mengakselerasi Momentum Pertumbuhan” yang berlangsung tiga hari (13-15 Juli), adalah forum yang mempertemukan pemerintah dan otoritas

selaku regulator, kepala daerah, investor dalam dan luar negeri, serta asosiasi dan pelaku usaha.

Sejumlah menteri kabinet menjadi pembicara, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perindustrian Agus Kartasasmita, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, serta Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Deretan pengambil keputusan di daerah dan pemangku kepentingan industri juga ambil bagian di forum ini, seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid, pimpinan asosiasi, serta direksi sejumlah perusahaan, yang menjadikan IDS sebagai salah

satu forum investasi terbesar yang pernah digelar di Indonesia.

Sama-sama Mulia

Presiden menegaskan, sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, atau yang dikenal sebagai sistem *online single submission* (OSS) berbasis risiko, telah diberlakukan secara serentak bulan ini, untuk memberikan kemudahan dalam memulai dan menjalankan usaha.

“Per Juli 2021, sistem OSS berbasis risiko wajib digunakan dan menjadi acuan tunggal dalam rangka penyelenggaraan perizinan berusaha secara elektronik, cepat, dan efisien. Penyederhanaan perizinan berusaha di pusat dan daerah serta berbagai insentif lainnya diharapkan dapat meningkatkan minat investor,” kata Presiden Jokowi.

Perizinan berusaha secara daring diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota untuk pelaku usaha, sehingga pebisnis tidak perlu mengajukan permohonan izin ke tempat lain. Dengan demikian, prosedur perizinan menjadi jauh lebih ringkas dan efisien.

Pemerintah juga memfasilitasi UMKM dan koperasi agar dapat berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan besar untuk menciptakan pemerataan dan kemandirian ekonomi.

“Pemerintah juga telah membentuk Satgas Percepatan Investasi, melalui Keputusan Presiden Nomor 11/2021, yang bertugas untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha, serta mendorong kerja sama investor besar dengan UMKM,” ujar Presiden.

Secara kumulatif, pencapaian realisasi investasi pada 2020 mencapai Rp 826,3 triliun atau 101,1% dari target Rp 817,2 triliun. Itu meliputi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp 413,5 triliun (50,1%) serta Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 412,8 triliun (49,9%). Investasi tersebut mampu menyerap 1.156.361 TKI dengan total 153.349 proyek.

Pada kesempatan ini, Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa pemerintah memberikan akses setara bagi investor berbasis UMKM dan koperasi dengan investor besar maupun investor asing. Peran mereka sama-sama mulia, karena sama-sama memberikan kesempatan kerja bagi rakyat Indonesia dan berkontribusi memajukan perekonomian bangsa.

“Saya ingin menggarisbawahi bahwa investasi jangan hanya dilihat sebagai investor besar. Pemerintah juga memberikan akses yang setara kepada golongan UMKM dan koperasi. Investor

berbasis UMKM dan koperasi sama mulianya dengan investor besar, investor asing. Sama-sama memberikan kesempatan kerja kepada rakyat Indonesia. Sama-sama berperan memajukan perekonomian bangsa,” tegasnya.

Momentum Transformasi

Presiden pun mengajak seluruh elemen bangsa memanfaatkan pandemi Covid-19 sebagai momentum untuk mengakselerasi reformasi dan transformasi struktural yang dituangkan dalam UU Cipta Kerja.

Presiden mengingatkan, pandemi jangan sampai menjadi penghambat proses reformasi dan transformasi struktural yang kini gencar dilakukan pemerintah. “Pandemi justru harus kita manfaatkan momentumnya untuk mempercepat reformasi struktural,” kata Presiden Jokowi.

Menghadapi pandemi Covid-19 sekarang ini, lanjut Presiden, pemerintah sejak awal sangat serius melakukan langkah-langkah konkret, baik

dalam penanganan sisi kesehatan, termasuk melalui program vaksinasi, perlindungan sosial untuk mengurangi beban bagi masyarakat yang terdampak, khususnya masyarakat kurang mampu hingga mengeluarkan program pemulihan ekonomi nasional.

Presiden mengatakan, salah satu upaya penting pemerintah untuk mereformasi struktur ekonomi nasional -- yang saat ini lebih banyak bergantung pada sektor konsumtif -- adalah dengan menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja untuk mempercepat industrialisasi dan menambah lapangan pekerjaan.

“Struktur ekonomi kita yang selama ini lebih dari 55%-nya dikontribusikan oleh konsumsi masyarakat harus perlahan kita alihkan menjadi lebih ke produkif, yakni dengan mendorong industrialisasi, hilirisasi, investasi, dan meningkatkan ekspor,” ucap Presiden.

Tentang penanganan pandemi, Presiden menegaskan berbagai upaya telah dan sedang ditempuh untuk mencegah penularan, menekan angka kematian, dan mengurangi dampak ekonomi kepada masyarakat akibat hilangnya pekerjaan atau menurunnya aktivitas ekonomi yang dipicu oleh krisis kesehatan.

Hilirisasi

Presiden juga menyebut bahwa investasi harus diarahkan pada upaya hilirisasi industri, guna meningkatkan nilai tambah, mengurangi impor, meningkatkan ekspor, dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia maju.

“Yang selama ini menikmati keuntungan dengan mengimpor produk-produk dari luar negeri, juga harus berubah menjadi produsen masuk ke hilirisasi dan mengambil peran dalam

meningkatkan kekuatan industri di dalam negeri,” kata Presiden.

Menurut Presiden, selama Januari-Mei 2021, sektor industri pengolahan telah menunjukkan kinerja yang baik selama masa pandemi. Ekspor produk industri pengolahan tercatat sebesar US\$ 66,70 miliar atau meningkat 30,53% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020.

“Industri pengolahan juga memberikan kontribusi paling tinggi yaitu 79,42% dari total ekspor sebesar US\$ 83,99 miliar pada periode Januari-Mei 2021. Kita harus berupaya meningkatkan peran Indonesia dalam rantai pasok global,” kata Presiden Jokowi.

Hal lain yang ditekankan Presiden adalah optimisme bahwa pada tahun 2030, ekonomi digital Indonesia akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara (Asean). “Nilai ekonomi digital

Indonesia diprediksi akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara dalam 10 tahun ke depan,” kata Kepala Negara.

Saat ini potensi ekonomi digital sangat luar biasa. Selama tahun 2020, nilai transaksi perdagangan digital Indonesia mencapai Rp 253 triliun. “Nilai ini diperkirakan akan meningkat menjadi Rp 330,7 triliun di tahun 2021. Potensi-potensi yang belum tergarap optimal harus kita optimalkan dan kembangkan,” kata Presiden Jokowi.

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi secara khusus mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan tahun 2021 sebagai momentum untuk bangkit dari keterpurukan yang diakibatkan pandemi Covid-19.

“Teruslah membangun optimisme dan harapan agar kita mampu bertransformasi menjadi

kekuatan ekonomi baru yang semakin kokoh, tangguh, dan mandiri,” ujar Presiden Jokowi.

Kerja Sama *Stakeholders*

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam *special remarks*-nya mengajak seluruh pihak untuk ikut bersama-sama mewujudkan momentum pertumbuhan ekonomi melalui akselerasi investasi. Berbagai kebijakan juga telah diambil untuk meningkatkan investasi yang diatur dalam UU Cipta Kerja.

“Berbagai upaya pemerintah untuk menangani Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional akan dapat tercapai melalui kerja sama yang baik dengan seluruh *stakeholders*, termasuk para investor dan pelaku ekonomi. Karenanya, pemerintah berkomitmen mendukung dan mendorong kemudahan berusaha dan perizinan

seperti yang ditetapkan UU Cipta Kerja,” kata Airlangga.

Dukungan yang diberikan salah satunya memberikan insentif bagi usaha prioritas dengan kriteria tertentu. Melalui kebijakan ini, diharapkan investasi produktif dapat tercipta, sehingga dapat membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.

Dengan ancaman Corona varian Delta, pemerintah berharap pandemi Covid-19 dapat tertangani, sehingga ekonomi Indonesia di 2021 bisa tumbuh positif di kisaran 3,7% sampai 4,5%. Sejumlah lembaga internasional juga memproyeksikan ekonomi Indonesia di 2021 akan tumbuh positif antara 4,3% sampai 4,9%. Kemudian di 2022 di kisaran 5% sampai 5,8%.

Permintaan domestik, lanjut dia, saat ini juga telah membaik dan direspons dengan peningkatan aktivitas produksi seperti di sektor industri

pengolahan, perdagangan, dan konstruksi. “Indeks PMI (Purchasing Managers' Index) manufaktur kita di bulan Juni tetap pada level ekspansi di 53,5. Bahkan, ini lebih tinggi dibandingkan berbagai negara lain, seperti Vietnam, Myanmar, Thailand, dan Malaysia,” tandas Airlangga.

Menurut dia, dengan peningkatan aktivitas produksi, dampak negatif terhadap ketenagakerjaan berangsur teratasi sehingga penduduk usia kerja yang terdampak selama pandemi yang pada tahun lalu sebesar 29,12 juta, kini mulai turun menjadi 19,1 juta orang.

“Di sisi eksternal, Indonesia terbantu dengan surplus neraca perdagangan selama 13 bulan berturut-turut dan ini ditopang oleh peningkatan harga komoditas global dan hal ini tentu diharapkan dapat memberikan sentimen positif bagi kegiatan ekspor impor Indonesia ke depan,” papar Airlangga.

Pada saat yang sama, kata dia, arus modal asing kembali masuk dan terjaganya level defisit transaksi berjalan (*current account deficit*) akan memberikan dasar yang kuat bagi ketahanan sektor eksternal Indonesia.

Selanjutnya, dengan berbagai kebijakan ekonomi yang telah diambil pemerintah, termasuk insentif perpajakan seperti relaksasi pajak pertambahan nilai (PPN), pemerintah melihat bahwa pemulihan ekonomi masih dapat terus berlangsung. “Angka pertumbuhan di kuartal II-2021 diharapkan masih bisa tumbuh di angka 7%,” tutur Airlangga.

Airlangga Hartarto mengakui bahwa kuartal III-2021 menjadi periode tantangan utama bagi pemulihan ekonomi Indonesia, seiring dengan penyebaran Covid-19, terutama varian Delta, yang eskalatif. Oleh karena itu, pemerintah bertekad untuk melakukan berbagai cara guna menekan laju penyebaran varian Delta.

Dua Perang

Pentingnya investasi juga ditekankan oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid. Dia mengatakan, saat ini Indonesia sedang menghadapi dua perang yaitu perang melawan pandemi dan perang ekonomi. Untuk itu dirinya ingin membangun Kadin yang inklusif dan kolaboratif, agar Kadin Indonesia bisa lebih berperan dalam membantu pemerintah memenangkan kedua perang tersebut.

Dia menerangkan, jika bicara soal inklusif itu berarti bicara mengenai pengusaha mikro, kecil, menengah, dan juga besar. Sedangkan kolaboratif adalah bagaimana membangun kemitraan di antara pengusaha, di antara pengusaha dengan pemerintah, di antara pengusaha dengan pekerja, dan juga pengusaha dengan pemangku kepentingan lainnya.

Lebih lanjut Arsjad menerangkan, pihaknya berpikir ke depan Kadin sebagai rumah semua pengusaha ikut mengupayakan kunci memulihkan kesehatan, untuk membangkitkan ekonomi.

Soal perang ekonomi, Arsjad menjelaskan, dengan adanya tantangan ekonomi yang dihadapi oleh setiap negara, Indonesia juga perang dengan negara lain untuk membawa investasi masuk.

“Di sinilah peperangan dan pertempuran-pertempuran kita yang harus kita menangkan. Jadi, itu yang ada dan bagaimana Kadin Indonesia bisa lebih berperan,” ucap dia.

Arsjad juga menekankan ekonomi daerah sebagai salah satu pilar untuk memperkuat ekonomi nasional. Dalam hal ini, kawasan ekonomi baru menjadi salah satu upaya untuk melakukan hal tersebut. Kawasan ekonomi baru bisa menumbuhkan kawasan aglomerasi. "Kadin

percaya bahwa ini bisa membuat yang namanya pemerataan ekonomi nasional, yang selama ini sangat sentralis di Jawa,” ujarnya.

Untuk memacu investasi di daerah dalam pengembangan kawasan ekonomi baru di berbagai wilayah di Indonesia, Kadin juga turut memberikan sejumlah dukungan. “Dalam proses pembangunan kawasan ekonomi baru, Kadin berperan melakukan promosi secara global melalui akses-akses yang dimiliki di forum-forum internasional, mulai dari forum investasi, ekonomi dan lainnya untuk membawa investor-investor global masuk ke Indonesia,” kata Arsjad.

Dominasi Perbankan

Sedangkan Dirut PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Royke Tumilaar menilai, dalam pembangunan infrastruktur, sumber pembiayaan dari industri perbankan masih mendominasi.

Hingga akhir 2020, penyaluran pembiayaan mencapai Rp 5.481,6 triliun atau 60% dari total sumber pembiayaan pembangunan.

Royke Tumilaar memaparkan, sumber dana dari luar negeri sebesar Rp 2.957 triliun, pembiayaan dari non-bank Rp 600 triliun, dan sumber dana dari pasar modal sebesar Rp 126 triliun.

"Perbankan punya kontribusi besar dalam pengembangan investasi melalui penyaluran kredit investasi," terang Royke.

Menurut Royke, penyaluran pembiayaan dari perbankan memang masih fokus di Pulau Jawa. "Kalau lihat kredit investasi perbankan yang disalurkan ke daerah, sampai April 2021 mencapai Rp 1.400 triliun, alokasi kredit investasi didominasi di Pulau Jawa, hampir 80% dari alokasi kredit nasional," tutur dia.

Dengan adanya kawasan ekonomi baru, diharapkan bisa mendorong penyaluran kredit investasi di luar Jawa. "Masih terdapat ruang perbankan untuk turut membiayai proyek investasi di kawasan ekonomi baru, khususnya di luar Jawa," ujar dia.

Adapun Dirut PT Telkom Tbk Ririek Adriansyah PT Telkom menyatakan, pihaknya memaknai pengembangan kawasan ekonomi baru di Indonesia dengan dua dimensi, yaitu dimensi geografis dan digital. Kedua dimensi ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Telkom.

Ririek Adriansyah mengatakan, pembangunan infrastruktur masih berpusat di Pulau Jawa. Ririek berharap, pembangunan infrastruktur bisa merata ke seluruh Indonesia. Terutama di beberapa daerah prioritas, seperti di kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, dan destinasi pariwisata prioritas.

Terkait dimensi digital, saat ini, kontribusi ekonomi digital terhadap PDB masih kecil.

Nilai ekonomi digital Indonesia pada 2020 sekitar US\$ 44 miliar (Rp 614 triliun) atau 4% dari PDB. Pada 2025, diproyeksikan tumbuh menjadi US\$ 124 miliar (Rp 1.760 triliun) 8% dari PDB. Lalu, pada 2030 diproyeksikan akan tumbuh menjadi US\$ 319 miliar (Rp 4.531 triliun) atau 18% dari PDB.

Di lain sisi, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai Subholding Gas dan bagian dari Holding Migas PT Pertamina (Persero), mengotimalkan peran gas bumi sebagai energi perantara menuju transisi energi, guna mendukung akselerasi investasi di kawasan ekonomi baru. PGN terus melakukan koordinasi dengan *stakeholder* di lapangan terkait pembangunan kawasan ekonomi baru di berbagai daerah.

"PGN sebagai penyedia energi untuk masyarakat termasuk kawasan ekonomi baru. Kita coba lakukan koordinasi bagaimana seluk-beluk untuk bisa membangun kawasan industri maupun kawasan ekonomi. Koordinasi merupakan kunci ke depan," kata Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Heru Setiawan.

Seperti yang disampaikan Presiden Jokowi, sesuai semangat cipta kerja yang konsepnya

adalah menurunkan impor, menaikkan ekspor, dan menciptakan *value* bagi bangsa, PGN akan menjalankan program gasifikasi nasional. “Program PGN untuk pemenuhan gas rumah tangga penting untuk berkontribusi menekan defisit neraca impor energi,” tegas Heru.

PGN juga mendukung industri khusus, ritel, dan industri umum termasuk kawasan industri yang disesuaikan dengan tata ruang masing-masing daerah. “Saat ini fokus di Jawa Barat dan Jawa Tengah, namun demikian terdapat *anchor* di daerah Indonesia Timur yang nantinya selaras dengan prioritas yang ketiga yaitu dalam penyediaan listrik nasional,” kata Heru.

Kawasan Industri Jateng

Upaya menarik investasi semaksimal mungkin juga dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Dia mengatakan, Kawasan Industri

Terpadu (KIT) Batang merupakan kawasan ekonomi baru di wilayahnya. Bahkan Ganjar menyebut KIT Batang didedikasikan untuk mengimbangi Vietnam yang dikenal sebagai negara yang memiliki kemudahan berinvestasi dengan berbagai insentifnya.

Ganjar menjelaskan, terdapat tiga kawasan ekonomi baru yang menjadi prioritas Pemprov Jateng, yakni Kawasan Industri Kendal, kawasan strategis nasional Borobudur, dan KIT Batang. Dari tiga kawasan tersebut, kata Ganjar, KIT Batang perkembangannya cukup pesat.

"Kadang-kadang kita punya semacam harta karun ketika beberapa tanah milik negara ada dan kemudian tidak optimal, padahal tempatnya sangat strategis, kemudian bisa kita lakukan *treatment* yang lebih bagus maka ternyata ini bisa jauh lebih cepat," katanya.

Hal ini setidaknya ditunjukkan dengan masuknya KCC Glass, perusahaan kaca besar asal Korea Selatan, yang mendirikan pabrik di KIT Batang. Selain itu, terdapat juga pabrik susu, bahkan perusahaan multinasional, LG pun akan masuk ke Batang. Masuknya berbagai investor terkemuka ini, kata Ganjar, tidak terlepas dari insentif yang diberikan.

Sedangkan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) menegaskan pembagian tugas antara pusat dan daerah dalam regulasi yang mengatur urusan perizinan usaha di daerah sudah jelas.

Staf Ahli Menteri Dalam Negeri bidang Ekonomi dan Pembangunan Hamdani mengatakan, dalam kaitan investasi yang diselenggarakan pemerintah daerah maka pilihan utamanya adalah bagaimana menarik investasi sebanyak mungkin guna mengatasi kesenjangan fiskal daerah dengan keterbatasan dukungan belanja APBD yang lebih mengarah ke pembangunan infrastruktur.

“Di sini kita menyambut baik adanya regulasi yang berkaitan dengan akselerasi kawasan ekonomi baru,” kata Hamdani. (ns/man/nid/hg)